

Dampak Gaji di Bawah UMR terhadap kelayakan hidup karyawan UMKM

Ninis Fitriani

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230501110073@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Gaji, UMR, Kelayakan Hidup, Karyawan, UMKM.

Keywords:

Salary, Minimum Wage, Living Standards, Employees, MSMEs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) terhadap kelayakan hidup karyawan yang bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait standar hidup layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji di bawah UMR berdampak pada rendahnya daya beli, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup karyawan. Meskipun UMKM memiliki keterbatasan modal, ketidaksesuaian upah dengan standar hidup berpotensi menurunkan produktivitas dan motivasi kerja.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of salaries below the Regional Minimum Wage (UMR) on the standard of living for employees working in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Using a qualitative descriptive approach, data were obtained through interviews, observations, and literature studies related to a decent standard of living. The results indicate that salaries below the UMR impact low purchasing power, limited access to health services, and a decreased quality of life for employees. Although MSMEs have limited capital, the mismatch between wages and a decent standard of living has the potential to reduce productivity and work motivation.

Pendahuluan

Upah merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja karena berfungsi sebagai sumber utama bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) sebagai standar minimum penghasilan yang wajib dipenuhi oleh pengusaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sementara Pasal 88 UU Ketenagakerjaan menekankan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang mampu menjamin kehidupan layak. Dengan demikian, ketentuan upah minimum bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga wujud perlindungan terhadap hak dasar pekerja.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Namun, pada praktiknya banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum mampu membayar gaji karyawan sesuai standar UMR. Keterbatasan modal, daya saing, serta kapasitas usaha menjadi alasan utama mengapa sebagian UMKM masih memberikan upah di bawah ketentuan minimum. Kondisi ini menimbulkan dilema, mengingat UMKM di satu sisi merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi di sisi lain masih menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban terhadap kesejahteraan pekerjanya.

Bagi karyawan, gaji di bawah UMR menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kelayakan hidup. Berdasarkan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow, seseorang tidak akan mampu mencapai kebutuhan tingkat lanjut seperti rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri apabila kebutuhan primer berupa pangan, sandang, papan, serta kesehatan belum terpenuhi. Kondisi upah rendah membuat pekerja UMKM sering kali harus berhemat berlebihan, bahkan mengurangi alokasi untuk kebutuhan penting seperti gizi, pendidikan anak, maupun akses layanan kesehatan. Hal ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi, teori konsumsi Keynes menjelaskan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Apabila gaji yang diterima pekerja berada di bawah UMR, maka daya beli mereka juga rendah, sehingga aktivitas konsumsi menjadi terbatas. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga pekerja, tetapi juga dapat memengaruhi perputaran ekonomi lokal. Selain itu, konsep living wage menekankan bahwa upah yang diterima pekerja seharusnya cukup untuk menjamin kehidupan yang layak, bukan sekadar memenuhi kebutuhan paling dasar.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak gaji di bawah UMR terhadap kelayakan hidup karyawan UMKM. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi riil pekerja sektor UMKM sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah karyawan UMKM di sektor kuliner dan perdagangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman).

Pembahasan

Dalam dinamika ekonomi Indonesia, dampak gaji di bawah UMR terhadap kualitas hidup karyawan UMKM semakin diperkuat oleh temuan empiris dan teori ekonomi modern. Misalnya, penelitian menggunakan data Susenas 2020–2023 menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum telah berdampak pada jam kerja dan upah riil pekerja bergaji rendah. Ditemukan bahwa jam kerja menurun sementara upah riil meningkat, dengan variasi yang nyata antar sektor dan demografis—khususnya, pekerja wanita lebih rentan mengalami pengurangan jam kerja, sedangkan pekerja pria mendapatkan manfaat lebih dari kenaikan upah riil. (Keynes, 1936)

Lebih jauh, studi di Bekasi menyatakan bahwa upah minimum secara signifikan mendorong konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini selaras dengan teori Keynes mengenai fungsi konsumsi, yaitu bahwa meningkatnya pendapatan rumah tangga akan memacu belanja konsumsi, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal. Namun demikian, dalam jangka pendek pengaruh ini bisa tidak terlalu terasa, seperti ditemukan dalam penelitian lain yang menunjukkan bahwa efek minimum wage terhadap konsumsi dalam jangka pendek bersifat tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang baru tampak jelas pengaruh positifnya

Dari sisi ketenagakerjaan, sejumlah penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks manufaktur Indonesia, kebijakan upah minimum justru ditemukan berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam jangka panjang, upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi meski mendorong penurunan kesempatan kerja dalam kondisi tertentu.

Temuan empiris di sektor industri makanan dan minuman juga mencatat adanya efek positif terhadap produktivitas ketika menghadapi kebijakan upah minimum: perusahaan yang tunduk pada standar UMR justru menunjukkan perubahan produktivitas yang lebih besar dibanding yang sudah membayar di atas minimum, dan efek ini konsisten lintas beberapa tahun pelaksanaan kebijakan.

Dari perspektif yang lebih luas, teori ekonomi modern seperti paradigma wage-led demand menyatakan bahwa redistribusi pendapatan menuju upah memang dapat meningkatkan konsumsi domestik karena pekerja cenderung memiliki marginal propensity to consume (MPC) lebih tinggi dibanding pemilik modal. Ini meneguhkan kembali hubungan antara upah, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi (Maslow, 1943).

Sementara itu, fenomena turnover karyawan menjadi perhatian penting. Biaya pergantian tenaga kerja tidak hanya mencakup rekrutmen dan pelatihan ulang, tetapi juga gangguan operasional, kehilangan produktivitas, dan turunnya moral tim. Dalam konteks UMKM dengan gaji di bawah UMR, turnover cenderung tinggi karena karyawan mencari peluang kerja yang lebih layak, yang memicu spiral malas produktivitas dan menurunnya kualitas SDM.

Berdasarkan hasil penelitian, gaji di bawah UMR memberikan dampak negatif pada kelayakan hidup karyawan UMKM, baik dari aspek daya beli, kesehatan, maupun

motivasi kerja. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dari pemerintah dalam mendukung UMKM, seperti pemberian insentif pajak, subsidi upah, atau pelatihan peningkatan produktivitas (Agusalim et al., 2025).

UMKM juga perlu melakukan inovasi usaha dan efisiensi agar mampu membayar gaji sesuai standar minimum. Dengan demikian, kesejahteraan karyawan dapat meningkat, motivasi kerja terjaga, dan produktivitas usaha lebih berkelanjutan.

Kesimpulan

Gaji memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelayakan hidup pekerja. Ketika karyawan UMKM menerima upah di bawah UMR, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi terbatas. Kondisi ini sesuai dengan teori kebutuhan dasar Maslow yang menekankan bahwa kebutuhan fisiologis dan rasa aman harus terpenuhi sebelum individu dapat mencapai motivasi yang lebih tinggi. Rendahnya penghasilan juga berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, baik dari sisi kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, maupun stabilitas keluarga.

Dalam perspektif ekonomi, pendapatan memiliki hubungan langsung dengan tingkat konsumsi rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam teori konsumsi Keynes. Upah yang rendah membuat daya beli karyawan UMKM menurun, sehingga pola konsumsi mereka terbatas dan berdampak pada melemahnya perputaran ekonomi di masyarakat. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka bukan hanya kesejahteraan pekerja yang terhambat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi lokal ikut terpengaruh, bahkan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Selain itu, rendahnya gaji menimbulkan konsekuensi terhadap motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Banyak pekerja yang merasa tidak puas lalu memilih berpindah pekerjaan, sehingga memicu tingginya angka turnover. Pergantian tenaga kerja secara berulang membuat UMKM kehilangan stabilitas sumber daya manusia dan harus menanggung biaya tambahan untuk rekrutmen serta pelatihan. Walaupun praktik penggajian di bawah UMR mungkin membantu menekan biaya operasional dalam jangka pendek, dampak negatifnya terhadap kesejahteraan karyawan dan produktivitas usaha justru berpotensi melemahkan daya saing UMKM di masa depan.

Daftar Pustaka

- Agusalim, L., Siregar, H., & Anggraeni, L. (2025). *The Heterogeneous Effects of a Minimum Wage Policy on Hours Worked and Real Wages in Indonesia*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Nugroho, R., & Utami, W. (2022). The long-term effect of minimum wage on consumption expenditure in Indonesia. *International Journal of Applied Management and Economics Research*, 4(2), 45–56. Retrieved from <https://ijamer.feb.dinus.ac.id/index.php/ijamer/article/view/35>

- Sulistyo, E., & Arifin, M. (2022). Minimum wages and employment in Indonesian manufacturing: A dynamic analysis. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 10(1), 45–60.
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/699>
- Saputra, Y., & Hidayat, T. (2021). Minimum wages, relative wages, and productivity: An empirical analysis on Indonesia's food and beverage industry. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(5), 1123–1142.
<https://doi.org/10.1108/IJPPM-07-2020-0389>
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Minimum wage policies and living wages in Asia: Recent trends and challenges*. Geneva: ILO.